

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Djalal, Abdul AR, *Sistem Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Dr. Abdoel Djalal As, 2011).
- Dalam Buku Panduan *E-Court the electronic justice system*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019).
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemahan. Fuady Munir, Teori-teori Besar *Grand Theory* dalam Hukum, Jakarta: Kencana, 2013.
- Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).
- Jainal, Arifin. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Grup : Jakarta), Cet 1 2008.
- Jainal, Arifin. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Grup : Jakarta), Cet 1 2008.
- Manan, Abdul. *aspek-aspek pengubah hukum*, Jakarta: kencana prenada media, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, (Jakarta : raja grafindo persada cet 7).
- Suadi. Amran, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik)*. (Jakarta: Prenada media Group, 2019).

syarifudin, Muhammad. Transformasi digital persidangan di era new normal, (Depok : PT Imaji cipta karya, 2020).

Yahya, Muhammad. Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

### **Jurnal**

Aidi, Zil. Implementasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian jurnal *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1,(Januari 2020 )*Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*.

Anifatus, Setyana. Shalihah, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.

Djarmiko, Hary. jurnal *Legalita, Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik*, Vol. 01, No. 01 Agustus–Desember 2019 (Hakim di Mahkamah Agung RI).

Gde Rudy, Dewa. *Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik*, jurnal pendidikan kewarganegaraan undiksa vol 9 no 1 (Februari 2021).

Hanum, Zulfia. Alfi Syahr, *Dinamika Digitalisasi Manajemen, Layanan Pengadilan Pusat Penelitian Dan*

Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI Fakultas Sosial Dan Humaniora.

Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: ALUMNI, 2012.

Iqbal, Khotib Hidayat Dkk, *Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) Dan Konvensional*.

Lawrence M. Friedman, *Law and Society*, Penerjemah: Wirhanuddin, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.

Munawaroh, Zakiatul. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian*.

Putra, Fahmi. Hidayat, "Efektifitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar", *Jurnal qaddauna* vol 2 no 1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. (Desember 2020).

Retnaningsih, Sonyendah Dkk. *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Indonesia)*" *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (Januari 2020), Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Suherman, "Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama DI Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, (September 2017), Bogor: STAI Al-Hidayah.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1995 *Tentang Mahkamah Agung Pasal 79*.

PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan Secara Elektronik.

PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

PERMA No. 19 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Persidangan.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, kepanitraan dan kesekretariat jendral mahkamah konsitusi RI : jakarta cet.8, 2018.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2)*.

### **Internet**

<https://web.pa-sumber.go.id/tahapan-tahapan-perkara/> diakses pada 30 September 2021, Pukul 09.15 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/sidang>. diakses pada 20 September 2021, Pukul 16.15 WIB.

“Profil Pengadilan Agama Cilegon” <http://www.pa-cilegon.go.id/> , diakses pada 20 September 2021, Pukul 14.20 WIB.

## **Responden**

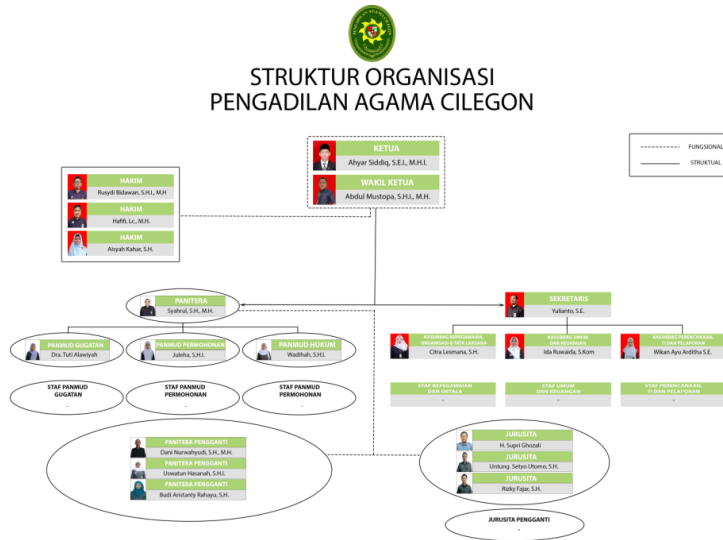
Bahtiar Rifai, Advokat LKBH FPP Kota Cilegon, wawancara dengan Penulis di Kantor LKBH FPP Kota Cilegon.

Hafifi, Hakim Pengadilan Agama Cilegon, wawancara dengan Penulis di Pengadilan Agama Cilegon, tanggal 4 November 2021.

Sri Murtini, Advokat Sri Murtini and Partner, wawancara dengan penulis di Kantor UPTD PPA Kota Cilegon, tanggal 27 Oktober 2021.

Syahrul, Panitera Pengadilan Agama Cilegon, wawancara dengan Penulis di Pengadilan Agama Cilegon, tanggal 4 November 2021.

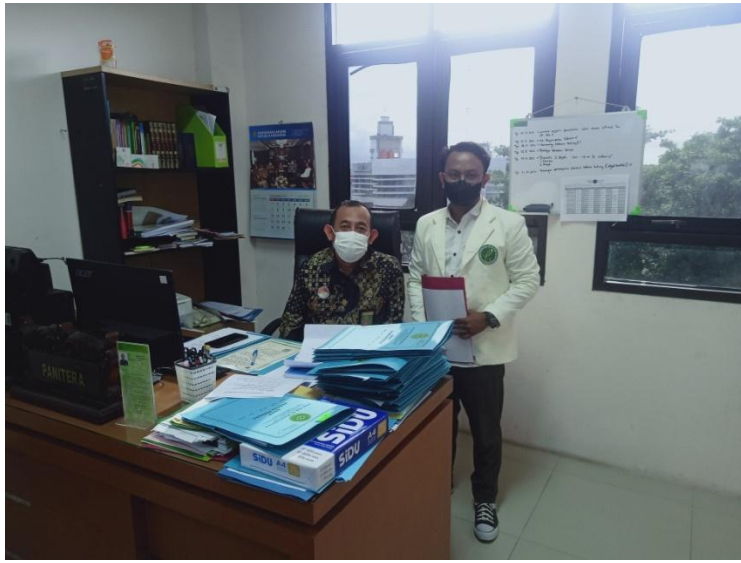
# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Bapak Hafifi, Lc., M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Agama Cilegon**



**Bapak Syahrul, S.H., M.H. Selaku Panitera pengadilan agama cilegon**



**Ibu Sri Murtini, S.H. Sebagai Advokat**



**Bapak Bahtiar Rifai, S.H. Sebagai Advokat LKBH FPP Kota  
Cilegon**

